

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik pada saat ini di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi suatu daerah yang kuat dan berkuasa jika mampu mengembangkan kebesarannya, tergantung pada cara pengelola keuangannya. Pengelola daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelola daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang untuk saat ini menuntut peningkatan kinerja penyerapan anggaran yang optimal. Pemerintah daerah sebagai birokrasi publik yang bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kondisi pemerintahan Kabupaten Lumajang yang seperti ini mendorong perlunya pengelolaan keuangan dan anggaran agar pengalokasian anggaran lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar melalui anggaran berbasis kinerja. Dalam melaksanakan aktivitas berupa pelayanan pada masyarakat, suatu wilayah bisa

menjalankannya tanpa adanya aturan. Hal ini dikarenakan aturan adalah dasar supaya pemerintah bisa beroperasi. Anggaran adalah dokumen yang berisi perkiraan kinerja, berupa penerimaan dan pengeluaran, yang tersaji berukuran moneter yang akan dicapai dalam periode saat ini yang tepat dan menyertakan data masa kemudian menjadi bentuk pengendalian dan evaluasi kerja.

Laporan tahunan pemerintah daerah merupakan laporan tahunan gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pelaporan Keuangan Pejabat Tata Usaha Negara Keuangan Daerah (PPKD). Untuk membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas pelaporan keuangan berkualitas tinggi dari SKPD dan PPKD juga diperlukan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah bagian dari pemerintah negara bagian melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara langsung maupun tidak langsung. SKPD menerima alokasi dana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Setiap laporan keuangan yang ada pada pemerintah daerah wajib dilengkapi menggunakan pengungkapan yang memadai (*disclosure*) mengenai informasi yang bisa memberikan suatu keputusan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1 mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, keuangan wilayah wajib dikelola secara tertib, taat dalam peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab menggunakan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat buat masyarakat. Apabila aturan itu memperhatikan kepentingan publik, maka sangat adil buat masyarakat. Untuk itu pada laporan keuangan tadi perlu dibantu menggunakan analisis laporan keuangan (Mahmudi, 2015). Analisis

laporan keuangan dimaksudkan supaya bisa membantu bagaimana cara mengetahui laporan keuangan, bagaimana menjelaskan angka dalam laporan keuangan dan bagaimana mengevaluasi laporan keuangan. Selain itu tujuan analisis merupakan untuk mengetahui posisi keuangan dalam masa kemudian dan kini yang akan dipakai menjadi dasar pengambilan keputusan tentang kebijakan masa datang.

Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah kelurahan, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang di tetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Anggaran adalah dokumen/data yang berisi perkiraan kinerja, berupa arus keuangan, yang dipaparkan dalam laporan yang akan diperoleh pada kurun waktu berjalan dan menyertakan data tahun sebelumnya sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kerja. Tujuan adanya anggaran sektor publik yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal (Tantri dan Irmawati, 2018). Alasan yang menjadi penting antara lain: (1) sebagai alat pemerintah untuk mengarahkan dan merealisasikan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (2) adanya tuntutan masyarakat yang terus berkembang, sedangkan sumberdaya yang ada terbatas, (3)

meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat dalam hal anggaran yang berkontribusi sebagai indikator akuntabilitas publik. Setiap lembaga pemerintahan wajib merencanakan anggaran agar penggunaan/arusdana menjadi efektif dan efisien (Pramono, 2014).

Di pemerintah Kabupaten Lumajang telah menggunakan sistem penganggaran yang mengacu pada kinerja sebagai pengganti dari sistem penganggaran manual. Pada sistem penganggaran manual ini menimbulkan perilaku ASN yang selalu berusaha menghabiskan anggaran tanpa memperdulikan output. Kelemahan dalam sistem anggaran manual ini kemudian dioptimalisasi melalui sistem penganggaran berbasis kinerja. Dengan digunakannya penganggaran yang mengacu pada kinerja, anggaran tidak berpusat pada serapan anggaran (input) tetapi pencapaian kinerja yaitu output dan outcome anggaran. Dalam realisasi anggaran menjelaskan perbandingan antara anggaran menggunakan realisasinya pada suatu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran merupakan memberi informasi mengenai realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menerangkan taraf ketercapaian target-target yang sudah disepakati antara legislatif dan eksekutif sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja keuangan bertujuan mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, mengetahui konsisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat untuk menganalisis

kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan. Kinerja keuangan sendiri mendeskripsikan ekonomi. Analisis informasi yang tersaji menggunakan suatu laporan keuangan, akan sangat bermanfaat bagi satuan kerja perangkat daerah untuk pengambilan keputusan dan untuk mengetahui kinerja keuangan. Untuk menggali lebih dalam lagi keterangan yang terkandung pada laporan keuangan, diharapkan suatu analisis laporan keuangan akuntansi pemerintah mengkhhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah ketika tujuan kegiatan mereka adalah sebaliknya. Milik organisasi komersial atau nirlaba. Perkembangan akuntansi pemerintah sangat berpengaruh pada perkembangan keuangan negara, sumber pendanaan, dan peraturan. Manajemen produk dan layanan. Akuntansi negara menyediakan pelaporan keuangan seperti: Berguna dalam kaitannya dengan aspek administrasi dan keuangan pemerintah dan administrasi bantuan kelola pengeluaran, termasuk anggaran negara, untuk mematuhi peraturan ketentuan hukum yang berlaku.

Saat ini masyarakat telah berada pada era transparansi. Teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang dari waktu ke waktu. Masyarakat dapat mengakses informasi yang tidak rumit. Dalam hal pengelolaan uang publik pun masyarakat semakin aktif untuk menuntut transparansi, salah satu cara untuk menilai kinerja pemerintahan adalah dengan mengetahui kinerja pemerintah yang diukur melalui indikator tertentu. Pengukuran kinerja memiliki tujuan untuk membantu pihak publik mengomentari pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mendeskripsikan tingkat perolehan suatu sasaran atau tujuan yang telah disusun

(Sumarno, 2016). Adapun persyaratan penyusunan indikator dan sasaran kinerja adalah (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif, (3) harus menangani aspek aspek objektif yang relevan, (4) dapat menunjukkan output, (5) sensitif terhadap perubahan, (6) terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif, (7) dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis datanya dengan biaya yang murah (Jeremy, 2011). Dalam konteks kinerja pemerintahan di Indonesia, pelaporan keuangan merupakan sebagian kecil bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja pemerintahan. Salah satu perangkat laporan keuangan yang dipublikasikan adalah laporan realisasi anggaran (LRA).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan indikator Laporan Keuangan pemerintah yang memaparkan informasi tentang capaian realisasi anggaran secara bersanding untuk suatu kurun waktu tertentu (Nasution, 2017). LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Tujuan adanya laporan LRA adalah (1) menetapkan acuan pemaparan laporan realisasi anggaran untuk pemerintah memenuhi tujuan akuntabilitas yang telah disusun oleh peraturan perundang-undangan, (2) memberikan informasi capaian/realisasi dan anggaran entitas pelaporan (Walandouw et al., 2015).

Masalah rendahnya serapan anggaran ditiga bulan pertama dan menggelembung di trimester empat masih terjadi sampai saat ini. Kinerja penyerapan anggaran seperti itu tidak akan membawa dampak positif bagi proses pembangunan suatu bangsa. Menurut bapak Jamil selaku Lurah Jogoyudan mengungkapkan kurangnya penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya kurang

baik . Serapan anggaran belanja negara memerlukan adanya keseimbangan dan proporsi pergerakan yang berjalan secara berkelanjutan Tujuan yang akan dicapai kemudian bukan hanya terpaku pada terserapnya anggaran, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana serapan anggaran dapat menghasilkan output yang berkualitas. Salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Lumajang yang menampakkan adanya persoalan belanja seperti Kelurahan Jogoyudan yang kurang stabil. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengadakan penelitian yang berjudul “*Perfoming Measurement dalam Realisasi Anggaran Kelurahan Jogoyudan*”.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas dan penelitian sebelumnya, supaya pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka perlunya batasan masalah dalam penelitian ini berupa kinerja keuangan dalam penyerapan anggaran yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari : pengukuran kinerja keuangan dalam penyerapan anggaran pada Kelurahan Jogoyudan selama kurun waktu waktu 3 tahun yang dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2019-2021.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan pada kelurahan Jogoyudan dalam penyerapan anggaran dengan penerapan analisis pertumbuhan belanja

2. Bagaimana serapan anggaran pada kelurahan Jogoyudan dengan menggunakan Varians Belanja keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh bukti bahwa seberapa besar nilai kinerja keuangan Kelurahan Jogoyudan dalam penyerapan anggaran dengan penerapan analisis pertumbuhan belanja.
2. Untuk mengetahui seberapa baik serapan anggaran pada Kelurahan Jogoyudan dengan menggunakan analisis varians belanja.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang dapat digolongkan dalam :

- a. Aspek Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan memperoleh pengalaman tentang penelitian yang membahas tentang performng measurement dalam realisasi anggaran Kelurahan Jogoyudan.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk lebih dikembangkan dan di terapkan, bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti pada bidang yang sama.

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan indikator penerapan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah, sehingga lebih menguasai kembali dari ilmu yang didapat pada saat menempuh mata kuliah Akuntansi.
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menganalisis keseimbangan antara teori dengan penerapannya di lapangan.

b. Aspek akademis

Penelitian ini digunakan untuk satu dari sebagian banyak syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Strata 1 pada Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

c. Aspek praktis

Hasil analisis ini sebagai masukan dan saran untuk SKPD sehingga dapat dijadikan suatu metode untuk mengukur kinerja keuangan dalam realisasi anggaran dengan menerapkan analisis pertumbuhan belanja dan varians belanja agar kinerja keuangan pada SKPD ini bisa menjadi lebih baik.